

Analisis Pekerja Anak Pada Sektor Perkebunan Tembakau Di Kabupaten Lombok Timur Perspektif Gender

M. Arif Budiman Hakim¹

¹Program Magister Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret

E- Mail: arifbudimanhakim7@gmail.com

Abstrak

Gender diartikan sebagai konstruksi sosial budaya yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan dengan gender maskulin dan sebaliknya jenis kelamin perempuan berhubungan dengan feminin, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah sebuah korelasi absolut. Temuan pokok Penelitian Pemberdayaan Buruh Anak Perempuan, adalah sebagai berikut: Pertama, banyaknya anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan ini, karena pihak perkebunan memang lebih banyak menerima buruh perempuan, alasan utamanya adalah karena buruh perempuan dianggap lebih telaten dan rapi dalam mengatur daun tembakau yang sangat rentan karena mudah robek. Kedua, keterlibatan anak-anak di pedesaan dalam pekerjaan di sektor perkebunan, memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama yang menyebabkan anak-anak tersebut dalam usianya yang masih belia sudah terlibat pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Ketiga, dalam hubungan produksi di perkebunan buruh anak perempuan dalam posisi tereksplotasi, marginal dan posisi tawarnya (bargaining position) rendah, seperti upah rendah, perbedaan perlakuan dengan buruh dewasa, dan beberapa kasus mengalami pelecehan seksual. Keempat, strategi pemberdayaan buruh anak seharusnya berada dalam empat pilar, yaitu buruh anak perempuan, keluarga, komunitas lokal, dan pemerintah.

Kata Kunci: Pekerja Anak, perkebunan Tembakau, Perspektif Gender

Abstract

Gender is defined as a socio-cultural construction that differentiates masculine and feminine characteristics. Gender is different from sex or the biological sex of men and women. Even though the male gender is often related to the masculine gender and conversely the female gender is related to the feminine, the relationship between sex and gender is not an absolute correlation. The main findings of the Research on the Empowerment of Female Child Workers are as follows: First, there are many girls who work in the plantation sector, because plantations accept more female workers, the main reason is because female workers are considered to be more painstaking and neat in managing the tobacco leaves they produce. very vulnerable because it tears easily. Second, the involvement of children in rural areas in work in the plantation sector, it cannot be denied that economic factors are always the main reason why these children are still involved in adult jobs at a young age. Third, in production relations on plantations, female child workers are in an exploited, marginal position and their bargaining position is low, such as low wages, different treatment from adult workers, and in some cases they experience sexual harassment. Fourth, the strategy for empowering child laborers should be based on four pillars, namely female child laborers, families, local communities and government.

Keyword: Child Labor, Tobacco plantations, Gender Perspective

PENDAHULUAN

Pergeseran peran perempuan yang semula pada kerja reproduktif ke produktif peningkatan . Secara kuantitas , perempuan memang lebih unggul dibandingkan laki -laki , hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perempuan memiliki potensi untuk berperan serta dalam pembangunan . Kualitas sumber daya perempuan juga tidak kalah dibandingkan dengan laki -laki . Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia akan sangat tergantung dari peran laki -laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan . Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan . Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak .

Kontribusi penduduk perempuan dalam pekerjaan upahan (*wage employment*) untuk sektor non-pertanian mengalami peningkatan dari 1996 sampai 1998, yaitu dari 28,3 persen menjadi 37,6 persen. Peningkatan kontribusi terjadi di hampir semua provinsi seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT bahkan telah mencapai lebih dari 50 persen. Namun sejak 1998 kontribusi perempuan itu menurun dari tahun ke tahun sehingga menjadi 28,26 persen pada 2002. Kecenderungan penurunan terjadi hampir di semua provinsi. Kondisi itu diduga terkait dengan krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak terjadi pada pekerja perempuan (Anonymous, 2023).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosial budaya yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan dengan gender maskulin dan sebaliknya jenis kelamin perempuan berhubungan dengan feminim, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah sebuah korelasi absolut (Kusairi and Ubaidillah, 2018). Perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin hanya menunjuk pada perbedaan biologis semata. Perbedaan secara biologis ini tidak dapat memasukkan dinamika sosial budaya yang sangat bervariasi antar struktur sosial masyarakat. Konsep gender berusaha menjawab hal ini. Gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan serta pola perilaku dan kegiatan yang menyertainya. Pengertian gender ini memberikan ruang yang sangat dominan terhadap dinamika sosial budaya masyarakat untuk turut mempengaruhi perbedaan peran laki-laki dan perempuan.

Sistem ladang berpindah merupakan sistem produksi lama yang ditemukan di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Sistem ladang berpindah sering diterapkan dalam masyarakat subsisten dan dalam masyarakat feodal, tanah dan tanaman belum terlalu menjadi komoditas. Sistem produksi pertanian berubah sebagai akibat tekanan penduduk yang meningkat dan ketersediaan tanah hutan sebagai sumber pangan yang berkurang. Pembukaan lahan mengalami penurunan intervalnya, sehingga kesuburan tanahnya belum sepenuhnya pulih. Konsekuensi dari hal ini adalah lebih banyak lahan hutan yang harus dibuka sehingga membutuhkan masukan tenaga kerja yang lebih banyak (Indriani, Wijayanti and Awalia, 2023).

Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan telah dimulai sejak masih anak-anak. Anak perempuan diarahkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Laki-laki sangat jarang menerima larangan atau peringatan tertentu mengenai tingkah laku. Perempuan dibatasi oleh norma-norma sehingga tidak bisa berbuat seperti halnya laki-laki (Ramdan, 2023) Sebagai salah satu anggota keluarga, wanita tani dan nelayan mempunyai andil yang tidak kecil didalam menambah pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Menurut Deshinta (2013), yang menjadi masalah wanita dalam masyarakat yang sedang berkembang adalah tingginya perbedaan imbalan dan penghargaan yang diterima antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita masih dipandang hanya sebagai pelengkap dari tenaga kerja pria, dan karena itu imbalan upah yang harus mereka terima mestilah lebih kecil dari upah atau nafkah pekerja pria. Apabila,

jika kenyataan menunjukkan bahwa dalam hal pendidikan dan keterampilan, tenaga kerja wanita masih sangat terbelakang, meskipun sebenarnya bila diberikan kesempatan yang sama tidak sedikit pekerja wanita yang mampu berprestasi dengan kaum pria. (Rosita, 2017)

Memahami persoalan sektor perkebunan tentunya tidak akan lepas dengan kapitalisme, karena di dalam ada komponen kapital (pengusaha perkebunan) dan tenaga kerja (buruh). Seperti yang diungkap Marx, kapitalisme meliputi dua unsur dasar, pertama, ia berdasar pada pembelian dan penjualan kekuatan tenaga kerja (kapasitas kerja individual), dan karena itu tenaga kerja adalah komoditi. Kedua, ia adalah sistem dimana para pengusaha menangani produksi komoditi supaya mendapatkan keuntungan maksimum, dan supaya dapat menaikkan kelipatan jumlah keuntungan. Alasan era kapitalis dapat membeli tenaga kerja kurang dari nilai penuhnya ialah bahwa mereka mempunyai kekuatan ekonomis. Mereka mempunyai sarana produksi, dan para buruh menjual tenaganya untuk bertahan hidup, karena itu mereka harus melakukannya menurut kepentingan para kapitalis. Tujuan produksi ialah akumulasi kapital, para kapitalis harus selalu menjaga harga tenaga kerja serendah mungkin. Kalau harga tenaga kerja naik, keuntungan kapitalis akan jatuh. Jadi hubungan antara kapital dan para buruh secara inheren adalah hubungan yang antagonistik, bila buruh untung maka kapitalis rugi, dan sebaliknya. (Kusairi and Ubaidillah, 2018)

Akhirnya modus kapitalis dalam produksi membawa kepada sebuah pembagian kelas antara kelas pekerja atau proletariat, di satu pihak, dengan kelas kapitalis di pihak lain, dan hubungan-hubungan kelas tersebut menjadi konfliktual karena para buruh dipaksa menjalin hubungan yang tidak sederajat. Dari pemikiran Marx diatas, nampaklah bahwa fenomena munculnya buruh anak dalam sektor perkebunan sangatlah dipahami dalam kerangka menjaga keuntungan kapitalis, artinya penggunaan tenaga kerja anak akan banyak menguntungkan para kapitalis, karena buruh anak bisa diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi seperti, upah rendah dan jam kerjanya panjang serta perlakuan lainnya yang merampas haknya sebagai pekerja dan memperburuk kualitas hidup dari anak tersebut (Kusairi and Ubaidillah, 2018)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini secara purposive memilih daerah perkebunan di Lombok Timur dengan alasan kabupaten tersebut merupakan daerah yang sebagian besar lahannya diperuntukkan untuk kegiatan di sektor perkebunan, dan perkebunan yang menjadi tonggak perekonomian kabupaten ini adalah perkebunan tembakau. Populasi penelitian ini adalah buruh anak yang bekerja di perkebunan. Jumlah sampel yang diambil adalah 60 buruh anak perempuan, dengan pertimbangan bahwa dengan jumlah tersebut akan diperoleh gambaran buruh anak perempuan yang memadai. Pengambilan jumlah 60 buruh anak tersebut dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dengan meminta bantuan LSM yang pernah melakukan pendampingan di daerah perkebunan tersebut untuk menunjukkan buruh anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan.

Data yang diperoleh dalam penelitian buruh anak perkebunan ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan cara: 1) melakukan wawancara dengan menggunakan seperangkat kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum tentang buruh anak perkebunan, 2) wawancara secara mendalam pada buruh anak dengan menggunakan seperangkat pedoman wawancara. Observasi secara langsung tentang keadaan buruh anak di tempat kerjanya juga dilakukan. Sementara data sekunder diperoleh dari Laporan Penelitian, jurnal, artikel, Biro Pusat Statistik (BPS) dan buletin yang diterbitkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung dalam penanganan buruh anak di sektor perkebunan.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu: 1) data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner, akan mendapatkan data yang lebih merupakan gambaran umum tentang eksploitasi buruh anak. Dalam tahap ini lebih banyak menganalisis data - data kuantitatif, 2) dari gambaran umum dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buruh anak perempuan: Eksploitasi dan ketidakberdayaan

Di dalam struktur organisasi yang ada di perkebunan ujung tombak dari PTPN X adalah mandor. Mandor memang menurut pembagian kerjanya bertugas secara langsung mengawasi kinerja dari buruh perkebunan. Sementara itu untuk memudahkan menjalankan tugas sebagai pengawas kinerja buruh tersebut, secara informal mandor dibantu oleh seseorang kepercayaan, yang juga buruh perkebunan. Orang kepercayaan mandor ini dikenal dengan istilah mbok/lokal, biasanya berasal dari buruh yang sudah senior. Tugas mbok ini bukan hanya sekedar membantu untuk mencari orang yang bisa bekerja di perkebunan, tetapi juga ikut membantu mengawasi pola tingkah laku dan kualitas pekerjaan para buruh. Yang menarik untuk dikaji lebih awal dan mendalam adalah bagaimana peran mandor dan asistennya yang dikenal dengan mbok, dengan alasan yang harus bisa diterima para buruh anak, terutama buruh anak yang baru bekerja untuk menyetero uang pada kedua orang tersebut, bisa langsung membayarnya pada waktu pertama kali masuk bekerja atau melalui pemotongan upah yang diterima setiap minggunya. Dengan cara yang terakhir ini seolah-olah tidak ada paksaan dan kelihatan pemberian yang sukarela, namun kenyataannya itu sudah berlaku umum dan semua buruh sudah tahu sama tahu. Besarnya potongan sekitar 10 sampai 20%. Jadi dengan menggunakan kemas balas jasa atau tanda terima kasih tersebut, seolah-olah tidak terjadi pemaksaan pemotongan upah dan dianggap sebagai aturan yang tak tertulis yang secara otomatis berlaku hampir dari generasi ke generasi. (Ramdan, 2023)

Ketidakberdayaan yang dialami buruh anak dalam pemotongan upah ini, sebenarnya juga tidak terlepas dari cukup banyaknya peminat yang ingin bekerja di sektor perkebunan tersebut, terutama bagi kaum perempuan. Keadaan ini menyebabkan secara tidak langsung memungkinkan terjadinya atau munculnya jaringan koneksi yang bisa masuk bekerja di perkebunan. Konsekwensi adanya koneksi tersebut membawa dampak pada pemberian sesuatu pada mbok atau mandor, yang tak jarang selain adanya pemotongan upah juga masih ditambah pemberian-sukarela seperti sembilan kebutuhan pokok (sembako) yang umumnya diantarkan ke rumah mandor atau mbok. Dari data lapangan, juga menunjukkan perlakuan eksploitatif lainnya, yaitu: masalah kerja lembur dan dimarahi yang merupakan pengalaman sehari-hari yang sering dirasakan para buruh anak, yang persentasenya sekitar 50 sampai 70%. Dalam hubungan kerjanya di perkebunan, buruh anak umumnya juga menjadi tumpuan kekesalan para mandor atau mbok. Mandor memang lebih berani dan lebih sering memarahi buruh anak dibandingkan dengan buruh dewasa. Karena dianggap buruh anak masih perlu dibina dan tidak berani membantah. Begitu juga dengan mbok, yang merasa diberi kewenangan oleh mandor dan juga sebagai bentuk rasa tanggungjawab pada mandor, karena para mbok itu ikut merekomendasi anak-anak tersebut bekerja di perkebunan tembakau. Perlakuan lain di perkebunan yang menjadi sorotan para buruh anak adalah tentang kerja lembur yang dilakukan buruh anak. Pekerjaan lembur biasanya muncul pada saat pertengahan sampai akhir masa petik daun, karena pada saat itu proses produksi terus berjalan berurutan seolah tanpa ada hentinya mulai pemetikan, pengovenan, penyortiran sampai pada pengepakan. (Indriani, Wijayanti and Awalia, 2023)

Yang menjadi keluhan buruh anak adalah kebanyakan kerja lembur tidak selalu berarti tambahan upah yang cukup, karena dalam beberapa kasus kerja lembur yang dilakukan buruh anak, dianggap merupakan sisa pekerjaan yang tidak bisa dicapai dengan waktu yang sudah distandardkan sehingga perkebunan merasa tidak perlu memberi upah lembur. Ketidakberdayaan buruh anak tidak hanya berhenti pada persoalan waktu kerja saja, tetapi juga perlakuan dalam pengaturan waktu istirahat. Dalam aturan perusahaan istirahat dilakukan pada siang hari selama satu jam, umumnya jam 12.00 sampai jam 13.00. Dalam kenyataan aturan ini lebih banyak merupakan aturan yang hanya tertulis di kertas, namun keadaan di lapangan sangatlah berbeda. Jika di gudang seng aturan jam istirahat relatif masih bisa dilakukan dengan baik, karena pekerjaan di gudang seng bisa tunda dan tidak diburu oleh pengaruh cuaca disamping itu daun tembakaunya sudah kering, sedangkan untuk pekerjaan di gudang atak, jadwal kerja tidak sama dengan di gudang seng, dan jadwalnya lebih tergantung dari banyak tidaknya daun tembakau yang masuk ke gudang, semakin banyak daun tembakau yang masih basah itu masuk gudang, kemungkinan jadwal kerjanya jadi lebih panjang dari biasanya, sehingga berakibat waktu istirahat jadi tidak menentu. (Fisip, karnaji and Mas'udah, 2013)

Perlakuan yang tidak menyenangkan di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam, ketika dibandingkan dengan data tentang penghargaan, sanjungan atau apapun istilahnya yang merupakan pemberian baik berupa materi atau pujian yang diterima buruh anak tersebut dari pihak pengelola perkebunan tembakau. Dari temuan data, terungkap bahwa perusahaan yang diwakili oleh mandor sebagai pelaksana langsung di lapangan, diakui oleh sebagian besar buruh anak sekitar 60 persen bahwa tidak pernah memberikan penghargaan (reward) pada buruh anak yang melakukan pekerjaan dengan baik. Penghargaan materi yang diterima buruh anak, seperti bonus upah atau pemberian barang lainnya, jelas tidak pernah diterima buruh anak, karena menurut pengalaman buruh anak selama ini, tidak pernah ada yang mendapat bonus tersebut, apalagi sebagian besar buruh anak merupakan pegawai yang tidak tetap, karena mereka ada yang diupah harian dan ada juga yang di upah borongan. Ketidakpedulian perkebunan dan terutama mandor sebagai pengawas langsung buruh akan penghargaan seperti pujian, menunjukkan bahwa mandor masih beranggapan bahwa yang butuh kerja itu adalah buruh, maka sudah menjadi kewajibannya buruh harus bekerja dengan baik, artinya bekerja memenuhi target, tidak pernah membolos dan pekerjaan rapi adalah memang sudah tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh buruh yang bekerja di perkebunan tembakau. Keadaan ini menambah deretan panjang dari perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima buruh anak dan juga menunjukkan proses marginalisasi buruh anak dan ketidakberdayaan menghadapi tekanan struktural tersebut. (Widodo, 2009)

Jika dilihat sepiintas dari kondisi dan fasilitas yang diterima buruh perkebunan tidak ada perbedaan antara buruh anak dan buruh lainnya, namun berdasarkan kajian yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ternyata ada perbedaan perlakuan antara buruh anak dan buruh dewasa, seperti yang ditemukan di lapangan, mengungkapkan bahwa ada sekitar 47 persen buruh anak mengakui ada perbedaan dan 79 persen buruh anak juga merasakan adanya perbedaan perlakuan antara buruh perempuan dengan buruh laki-laki, misalnya soal upah lembur dan upah harian. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa buruh anak yang bekerja dengan waktu yang sama dengan buruh dewasa, acap kali upah yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan buruh dewasa, apalagi buruh anak perempuan upahnya lebih sedikit dibandingkan dengan buruh anak laki-laki. Alasan yang sangat klasik yang dikemukakan, yaitu bahwa pekerjaan anak laki-laki lebih banyak mengandalkan otot dibandingkan dengan buruh perempuan, makanya wajar kalau buruh laki-laki diupah lebih besar daripada buruh perempuan. Perbedaan dalam hal upah yang diterima buruh anak laki-laki dan perempuan serta antara buruh anak dan buruh dewasa. Salah satu contoh perbedaan upah tersebut adalah pada saat kerja di gudang seng, dimana buruh perempuan yang bekerja mulai jam 07.00 sampai dengan 16.00, dengan istirahat sekitar satu jam dibayar sekitar Rp. 9.000,-sedangkan buruh laki-laki dibayar sekitar Rp. 10.000 Perbedaan upah ini sekali lagi karena dianggap laki-laki lebih banyak mengeluarkan tenaga (energi) yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, karena pekerjaannya memikul, mengangkut dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan kasar. Sedangkan buruh perempuan pekerjaan lebih santai karena mengerjakannya sambil duduk dan seolah-olah hanya tangannya yang berfungsi bekerja.

Asumsi pengupahan yang berdasarkan sifat maskulin dan feminin tersebut sudah menjadi hal yang wajar dalam lingkungan perkebunan, sehingga sudah dianggap sebagai aturan yang tak terbantahkan, dan keadaan inilah yang akan melestarikan budaya patriarkhi, yang menganggap bahwa laki-laki memang harus dinilai lebih dibandingkan dengan perempuan. Padahal kalau dikaji lebih dalam pekerjaan perempuanlah sebenarnya yang memerlukan energi dan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan buruh laki-laki. Persoalan pembedan upah di perkebunan ternyata sudah menjadi masalah sejak jaman kolonial Belanda. Menurut Galuh (2023) bahwa upah perempuan tidak pernah lebih dari 50 persen upah laki-laki. Buruh perempuan yang sebagian besar (sekitar 80%) mendominasi perkebunan mendapatkan upah yang lebih rendah, dengan sistem pengupahan harian lepas dibandingkan dengan buruh laki-laki yang jumlahnya lebih sedikit dengan menggunakan buruh harian tetap. Dari data di lapangan, ada perbedaan perlakuan antar buruh di perkebunan, dengan persentase yang paling banyak adalah masalah kerja lembur 36,2% dan 19 % dan upah 42,5 % dan 55,7 % yang diterima selama menjadi buruh perkebunan.

Persoalan upah merupakan masalah klasik, para buruh anak di perkebunan menanggapi soal upah seolah-olah sudah pasrah, menerima berapapun yang akan diberikan oleh mandor yang menggajinya. Buruh anak lebih banyak melihat patokan upah bukan berasal dari perhitungan yang rasional yang sudah mereka perhitungkan, tetapi lebih banyak nerima berapapun yang diberi mandor, asal sama dengan besar upah teman sebayanya yang sama-sama bekerja dalam satu bagian. Jadi kalau kerja warganegara, misalnya, kalau temannya mendapat upah sebesar Rp. 8000, maka buruh anak tersebut tidak banyak tanya dan protes akan menerima sama sebesar Rp. 8.000 juga, meskipun waktu kerjanya kalau dihitung berdasarkan standar gaji, harusnya dibayar Rp.9.200,-. Pihak perkebunan (mandor) memang acapkali membedakan upah buruh anak dengan buruh dewasa, terutama mereka yang masih baru bekerja di PTPN X tersebut.

Perbedaan upah dengan buruh dewasa, umumnya berkisar antara Rp. 1000,- sampai Rp. 2.500,-, meskipun sebenarnya jumlah jam kerja buruh anak tersebut sama lamanya. Untuk kasus upah lembur, pihak perusahaan, terutama mandor masih menganggap meskipun anak ikut dalam lembur, hasil aktivitas pekerjaannya dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan buruh dewasa. Berbagai alasan dikemukakan, ada yang karena menganggap pekerjaan buruh anak lebih lambat, kurang rapi dan alasan lainnya yang memungkinkan mandor mengupah lebih rendah. Penelitian Alan Boulton (2011) dalam studi kualitatif mengenai pekerja anak, usia 7 – 18 tahun di industri manufaktur skala kecil dan besar di Jawa Barat, mengungkapkan bahwa pembagian kerja tidak didasarkan usia, tetapi berdasarkan jenis kelamin. Anak laki-laki mengerjakan pekerjaan laki-laki dewasa, demikian juga buruh anak perempuan mengerjakan tugas yang sama dengan buruh perempuan dewasa. Mengenai upah, kedua peneliti ini juga menemukan bahwa buruh anak di upah lebih rendah, padahal produktivitasnya sama dengan buruh dewasa. Sementara itu, temuan data di lapangan menunjukkan bahwa jenis gangguan yang buruk di perkebunan, menurut buruh anak selain persoalan polusi udara ada 54%, ternyata masalah pelecehan seksual menempati peringkat kedua dengan persentase 14%. Di perkebunan tembakau buruh perempuan dewasa dan buruh anak perempuan mempunyai nasib yang sama soal pelecehan seksual.

Bahkan buruh anak dalam posisi yang lebih rawan karena selain pelecehan itu dilakukan oleh para mandor yang selalu mengawasinya, banyak juga buruh dewasa laki-laki yang cukup sering ikut-ikutan melakukan pelecehan baik itu melalui kata-kata maupun dengan menyentuh bagian tertentu dari tubuh buruh anak perempuan tersebut. Persoalan pelecehan seksual di perkebunan menjadi menarik, karena di tengah mayoritas buruh perempuan yang bekerja, ternyata perempuan jugalah yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Buruh anak yang sebagian besar juga perempuan, seolah-olah sebagai obyek yang mudah untuk dilecehkan. Pernyataan ini muncul karena buruh anak perempuan cukup sering mengalami pelecehan seksual mulai dari mandor, mbok, buruh senior baik laki-laki maupun perempuan, bahkan ada juga dilakukan oleh buruh anak laki-laki. Pola pelecehan seksual yang dialami buruh anak perempuan ada dua, pertama, mandor, buruh senior dan anak yang berjenis kelamin laki-laki. Pelecehan seksualnya lebih beragam, mulai dari menggunakan kata-kata, misalnya merayu, menggoda, atau menyebut bagian tubuh dari buruh anak perempuan sampai pada tindakan memegang atau mencolek bagian tertentu tubuh buruh perempuan tersebut. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki ini umumnya tindakan yang iseng, karena dianggap buruh anak tidak akan marah bila dilecehkan.

Pola kedua, oleh mbok, buruh senior yang perempuan. Pelecehan seksualnya hanya sebatas menyebutkan bagian tubuh perempuan atau yang berkaitan dengan kegiatan perempuan, biasanya dikaitkan dengan kritik kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh anak perempuan. Misalnya jika buruh anak perempuan melakukan pekerjaan selalu lambat atau tidak cekatan, disindir bahwa bisanya cuma membesarkan pantat. Ada juga yang menghubungkan tata riasnya dengan pekerjaannya, seperti bisanya cuma merias (dandan), tetapi kalau disuruh bekerja tidak rapi. Perlakuan-perlakuan yang diterima buruh anak dalam beberapa kasus di atas membuktikan bahwa posisi buruh anak selalu berada dalam dua kondisi, pertama, dalam hubungan kerjanya berada dalam pihak yang mudah dimarahi, diperlakukan semena-mena dan perlakuan tidak adil lainnya oleh mandor yang dalam struktur merupakan atasan langsungnya. Kemudian yang kedua, buruh anak di tempat kerjanya juga harus menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari kalangan buruh senior, mulai dari sebagai kambing hitam bila ada pekerjaan yang tidak selesai sesuai target sampai dengan pelecehan seksual. Keadaan inilah yang membuat buruh anak selalu

tidak bisa bebas dan dalam posisi marginal ganda (double marginal) karena terjepit antara dua pihak, pihak yang terkait dengan struktur (mandor) dan sesama buruh, tetapi yang dewasa (buruh senior).

Strategi pemberdayaan buruh anak perempuan

Langkah awal yang semestinya disadari bahwa pemberdayaan masyarakat miskin (seperti keluarga buruh anak perempuan), sesungguhnya akan selalu berkaitan atau sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek. Pertama, berkaitan dengan upaya peningkatan posisi tawar (bargaining position) masyarakat miskin (termasuk buruh anak) melawan kekakuan (rigidity) dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya, program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak hanya terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif dan apalagi yang bersifat punitif, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable. Kedua, berkaitan dengan upaya mengurangi kadar kerentanan dan sekaligus bagaimana memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga miskin (buruh anak perempuan). Dalam hal ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mendorong pengembangan kegiatan produktif alternatif keluarga miskin di luar sektor perkebunan. (Widodo, 2009)

Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan masyarakat miskin yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial. Ketiga, meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di lapangan. Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat, khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan kontrol dari lembaga-lembaga lokal dan kelompok-kelompok sekunder di masyarakat.

Dengan berbekal tiga poin di atas, dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada buruh anak perempuan di perkebunan tembakau agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya, secara garis besar ada dua jalan yang bisa ditempuh dengan cara: 1) dengan cara meningkatkan kualitas posisi tawar (bargaining position) buruh anak perempuan; 2) dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga buruh anak perempuan. Berikut ini, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan program pemberdayaan buruh anak perempuan di perkebunan tembakau, yaitu: Pertama, sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan buruh anak perempuan di perkebunan tembakau tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara membolehkan anak berkerja di perkebunan. (Fisip, Karnaji and Mas'udah, 2013)

Pemberdayaan buruh anak perempuan seyogyanya mempertimbangkan dan bahkan harus bertumpu kepada keberadaan pranata sosial-budaya di masing-masing komunitas lokal buruh anak perempuan. Jadi, program apa pun yang digulirkan atas nama program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah perkebunan tembakau, khususnya buruh anak perempuan alangkah bijak jika dalam pelaksanaannya tidak mencoba membentuk kelompok-kelompok target di luar organisasi dalam masyarakat. Kedua, apa pun bantuan yang diberikan kepada kelompok buruh anak perempuan seyogianya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek sekadar menekankan pada kepentingan pemberian upah yang sama dengan buruh dewasa, tetapi harus lebih berorientasi pada pemupukkan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis. Pendek kata, bagi komunitas buruh anak perempuan, program pemberdayaan buruh anak terutama soal kemiskinannya sifatnya holistik, yaitu keterlibatan buruh anak, keluarga dan komunitas lokalnya, serta kebijakan pemerintah yang memihak pada kepentingan buruh anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan pokok Penelitian Pemberdayaan Buruh Anak Perempuan, adalah sebagai berikut: Pertama, banyaknya anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan ini, karena pihak perkebunan memang lebih banyak menerima buruh perempuan, alasan utamanya adalah karena buruh perempuan dianggap lebih telaten dan rapi dalam mengatur daun tembakau yang sangat rentan karena mudah robek. Kedua, keterlibatan anak-anak di pedesaan dalam pekerjaan di sektor perkebunan, memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama yang menyebabkan anak-anak tersebut dalam usianya yang masih belia sudah terlibat pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Ketiga, dalam hubungan produksi di perkebunan buruh anak perempuan dalam posisi tereksplorasi, marginal dan posisi tawarnya (*bargaining position*) rendah, seperti upah rendah, perbedaan perlakuan dengan buruh dewasa, dan beberapa kasus mengalami pelecehan seksual. Keempat, strategi pemberdayaan buruh anak seharusnya berada dalam empat pilar, yaitu buruh anak perempuan, keluarga, komunitas lokal, dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Fisip, S., karnaji and Mas'udah, S. (2013) 'Model pemberdayaan komunitas buruh anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan tembakau di Jawa Timur', 26, pp. 90–107.

Indriani, A., Wijayanti, E. and Awalia, H. (2023) 'Peran Perempuan Dalam Usaha Tani Tembakau Di Desa Sakra Selatan', *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), pp. 373–386.

Kusairi, L. and Ubaidillah, K. (2018) 'BhÃjheng Nyiram, BhÃjheng Ajer: Potret Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Madura', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.22515/bg.v3i1.1328>.

Ramdan, D. (2023) 'Motif Pekerja Anak Sektor Pertanian Tembakau Di Desa Jeropuri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah', *Kebijakan Pembangunan*, Vol-18, p. 85. Available at: <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.300>.

Rosita (2017) 'Quo Vadis Pekerja Anak Pada Perkebunan Tembakau Di Kabupaten Jember', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.57>.

Widodo, S. (2009) 'Analisis peran perempuan dalam usahatani tembakau', *Embryo*, 6(2), pp. 148–153.

Alan Boulton, Organisasi Perburuhan Internasional "Pekerja Anak di Industri Tembakau Jember", Jakarta, 200

Emmy Hermanus, Stella Aleida, Rezanti P, Fatin Nuha A., Elza Elmira, Veto, Widjajanti, Laporan penelitian semeru studi diagnostik pekerja anak di wilayah perdesaan (dengan penekanan khusus pada perkebunan tembakau rakyat), Jakarta: The Smeru research institute, 2021

Abdillah Ahsan, Nur Hadi Wiyono, Kondisi petani tembakau di Indonesia: studi kasus di tiga wilayah penghasil tembakau, 2018

Deshinta Vibriyant, Ketimpangan jender dalam partisipasi ekonomi: analisis data sakernas 1980-2013, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 8 No. 1 Tahun 2013

Galuh Husni Setiawan, Analisis peran gender, usia, dan tingkat pendidikan terhadap organizational

National Conferences: "Research and Community Service (Implementation of the of Scientifically Based Research in The Era of Society 5.0)

citizenship behavior karyawan di PTPN X Ajong gayasan jember, Jember, UIN Jember, 2023